

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 3

TAHUN 2017

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN KODE LOKASI DAN KODE BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 118 Tahun 2010 tentang Pembakuan Nomor Kode Lokasi Barang Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a dan Pasal 512 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah serta dalam upaya mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kode Lokasi dan Kode Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang.....2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN KODE LOKASI DAN KODE BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah.....3

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Majalengka.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
9. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
10. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
11. Kode Lokasi adalah nomor kode yang menggambarkan atau menjelaskan keberadaan dan Pengguna Barang pada SKPD.
12. Kode Barang adalah kode yang menggambarkan bidang, kelompok, sub kelompok, sub-sub kelompok dan uraian jenis barang.
13. Kodefikasi barang adalah pemberian kode barang pada setiap barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten Majalengka yang menyatakan Kode Lokasi dan Kode Barang.
14. Nomor Register adalah nomor urut pencatatan yang menunjukkan jumlah unit dari setiap barang yang sejenis, tahun perolehan dan nilai barang sama.

Pasal 2

Kode Lokasi Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Kode Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pencatatan dan Pemberian Kodefikasi Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

SKPD yang memiliki UPT agar tindaklanjuti dengan menetapkan Kode Lokasi untuk setiap UPT dengan Keputusan Pengguna Barang dan melaporkan ke Pengelola Barang.

Pasal 6.....4

Pasal 6

- (1) Setiap barang milik daerah dipasang label barang yang telah diisi kodefikasi barang;
- (2) Pemasangan label barang milik daerah di tempat yang terlihat dan memungkinkan untuk pemasangannya;
- (3) Apabila tidak mungkin untuk dipasang maka cukup dicatat di Buku Inventaris, Kartu Inventaris Barang (KIB) atau Kartu Inventaris Ruangan (KIR) pada Pengguna Barang.

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, secara terkait akan diatur lebih lanjut oleh Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Majalengka.

Pasal 9

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 118 Tahun 2010 tentang Pembakuan Nomor Kode Lokasi Barang Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada Tanggal 27 Januari 2017

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 27 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



AHMAD SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2017 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd
NIP. 19680327 199603 1 003

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 3 Tahun 2017

Tanggal : 27 Januari 2017

Tentang : **PENETAPAN KODE LOKASI DAN KODE BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA****KODE LOKASI BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**

| NO. | BIDANG | NOMOR KODE | UNIT BIDANG | NOMOR KODE |
|------------|--|-------------------|--|-------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| 1. | SEKRETARIAT DPRD | 01 | Sekretariat DPRD | 12 10 09 01 01 |
| 2. | BUPATI | 02 | Bupati | 12 10 09 02 01 |
| 3. | WAKIL BUPATI | 03 | Wakil Bupati | 12 10 09 03 01 |
| 4. | SEKRETARIAT DAERAH | 04 | Sekretariat Daerah | 12 10 09 04 01 |
| 5. | BIDANG KIMPRASWIL / P.U | 05 | 1. Dinas Bina Marga dan Cipta Karya | 12 10 09 05 01 |
| | | | 2. Dinas Perumahan, Permukiman dan Sumber Daya Air | 12 10 09 05 02 |
| 6. | BIDANG PERHUBUNGAN | 06 | Dinas Perhubungan | 12 10 09 06 01 |
| 7. | BIDANG KESEHATAN | 07 | 1. Dinas Kesehatan | 12 10 09 07 01 |
| | | | 2. Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka | 12 10 09 07 02 |
| | | | 3. Rumah Sakit Umum Daerah Cideres | 12 10 09 07 03 |
| 8. | BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 08 | Dinas Pendidikan | 12 10 09 08 01 |
| 9. | BIDANG SOSIAL | 09 | 1. Dinas Sosial | 12 10 09 09 01 |
| | | | 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 12 10 09 09 02 |
| | | | 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 12 10 09 09 03 |
| | | | 4. Dinas Perdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 12 10 09 09 04 |
| | | | 5. Dinas Pemuda dan Olah Raga | 12 10 09 09 05 |
| 10. | BIDANG KEPENDUDUKAN | 10 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 12 10 09 10 01 |
| 11. | BIDANG PERTANIAN | 11 | 1. Dinas Pertanian dan Perikanan | 12 10 09 11 01 |
| | | | 2. Dinas Pangan | 12 10 09 11 02 |
| 12. | BIDANG PERINDUSTRIAN | 12 | 1. Dinas Perdagangan | 12 10 09 12 01 |
| | | | 2. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian | 12 10 09 12 02 |
| | | | 3. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | 12 10 09 12 03 |
| 13. | BIDANG PENDAPATAN | 13 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 12 10 09 13 01 |
| 14. | BIDANG PENGAWASAN | 14 | Inspektorat Kabupaten | 12 10 09 14 01 |
| 15. | BIDANG PERENCANAAN | 15 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 12 10 09 15 01 |
| 16. | BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | 16 | Dinas Lingkungan Hidup | 12 10 09 16 01 |
| 17. | BIDANG PARIWISATA | 17 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 12 10 09 17 01 |
| 18. | BIDANG KESATUAN BANGSA | 18 | 1. Satuan Polisi Pamong Praja | 12 10 09 18 01 |
| | | | 2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik | 12 10 09 18 02 |
| 19. | BIDANG KEPEGAWAIAN | 19 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 12 10 09 19 01 |
| 20. | BIDANG PENGHUBUNG | 20 | | 12 10 09 20 - |
| 21. | BIDANG KOMUNIKASI, INFORMASI DAN DOKUMENTASI | 21 | 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 12 10 09 21 01 |
| | | | 2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 12 10 09 21 02 |
| | | | 3. Dinas Komunikasi dan Informatika | 12 10 09 21 03 |

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 3 Tahun 2017

Tanggal : 27 Januari 2017

Tentang : **PENETAPAN KODE LOKASI DAN KODE BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA****KODE BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**


| Golongan | Bidang | Kelompok | Sub Kelompok | Sub-sub Kelompok | U r a i a n |
|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------------------|--|
| 01 | * | * | * | * | GOLONGAN TANAH |
| 01 | 01 | * | * | * | TANAH |
| 01 | 01 | 01 | * | * | PERKAMPUNGAN |
| 01 | 01 | 01 | 01 | * | Kampung |
| 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | Tanah Kampung |
| 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | Tanah Kampung lainnya |
| 01 | 01 | 01 | 02 | * | Emplasmen |
| 01 | 01 | 01 | 02 | 01 | Tanah Emplasmen |
| 01 | 01 | 01 | 02 | 02 | Tanah Emplasmen lainnya |
| 01 | 01 | 01 | 03 | * | Kuburan |
| 01 | 01 | 01 | 03 | 01 | Tanah Kuburan Islam |
| 01 | 01 | 01 | 03 | 02 | Tanah Kuburan Kristen |
| 01 | 01 | 01 | 03 | 03 | Tanah Kuburan Cina |
| 01 | 01 | 01 | 03 | 04 | Tanah Kuburan Hindu |
| 01 | 01 | 01 | 03 | 05 | Tanah Kuburan Budha |
| 01 | 01 | 01 | 03 | 06 | Tanah Makam Pahlawan |
| 01 | 01 | 01 | 03 | 07 | Tanah Tempat Benda Bersejarah |
| 01 | 01 | 01 | 03 | 08 | Tanah Makam Umum/Kuburan Umum |
| 01 | 01 | 01 | 03 | 09 | Tanah Kuburan Lainnya |
| 01 | 01 | 02 | * | * | TANAH PERTANIAN |
| 01 | 01 | 02 | 01 | * | Sawah Satu Tahun Ditanami |
| 01 | 01 | 02 | 01 | 01 | Tanah Sawah Padi |
| 01 | 01 | 02 | 01 | 02 | Tanah Sawah Palawija |
| 01 | 01 | 02 | 01 | 03 | Tanah Sawah Ditanami Tebu |
| 01 | 01 | 02 | 01 | 04 | Tanah Sawah Ditanami Sayuran |
| 01 | 01 | 02 | 01 | 05 | Tanah Sawah Ditanami Tembakau |
| 01 | 01 | 02 | 01 | 06 | Tanah Sawah Ditanami Rosella |
| 01 | 01 | 02 | 01 | 07 | Tanah Sawah Pertanian Percontohan/Pembibitan |
| 01 | 01 | 02 | 01 | 08 | Tanah Sawah Satu Tahun Ditanami Lainnya |
| 01 | 01 | 02 | 02 | * | Tegalan |
| 01 | 01 | 02 | 02 | 01 | Tanah Tegalan Buah-buahan |
| 01 | 01 | 02 | 02 | 02 | Tanah Tegalan Tembakau |
| 01 | 01 | 02 | 02 | 03 | Tanah Tegalan Jagung |
| 01 | 01 | 02 | 02 | 04 | Tanah Tegalan Ketela Pohon |
| 01 | 01 | 02 | 02 | 05 | Tanah Tegalan Kacang Tanah |
| 01 | 01 | 02 | 02 | 06 | Tanah Tegalan Kacang Hijau |
| 01 | 01 | 02 | 02 | 07 | Tanah Tegalan Kedelai |
| 01 | 01 | 02 | 02 | 08 | Tanah Tegalan Ubi Jalar |
| 01 | 01 | 02 | 02 | 09 | Tanah Tegalan Keladi |
| 01 | 01 | 02 | 02 | 10 | Tanah Tegalan Lainnya |
| 01 | 01 | 02 | 03 | * | Ladang |
| 01 | 01 | 02 | 03 | 01 | Tanah Ladang Padi |
| 01 | 01 | 02 | 03 | 02 | Tanah Ladang Jagung |
| 01 | 01 | 02 | 03 | 03 | Tanah Ladang Ketela Pohon |
| 01 | 01 | 02 | 03 | 04 | Tanah Ladang Kacang Tanah |
| 01 | 01 | 02 | 03 | 05 | Tanah Ladang Kacang Hijau |
| 01 | 01 | 02 | 03 | 06 | Tanah Ladang Kedelai |
| 01 | 01 | 02 | 03 | 07 | Tanah Ladang Ubi Jalar |
| 01 | 01 | 02 | 03 | 08 | Tanah Ladang Keladi |
| 01 | 01 | 02 | 03 | 09 | Tanah Ladang Bengkuang |
| 01 | 01 | 02 | 03 | 10 | Tanah Ladang Apel |
| 01 | 01 | 02 | 03 | 11 | Tanah Ladang Kentang |

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 3 Tahun 2017
Tanggal : 27 Januari 2017
Tentang : **PENETAPAN KODE LOKASI DAN KODE BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.**

PENCATATAN DAN PEMBERIAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH

CONTOH KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH :

| Kolom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-----|---------------|
| Pemerintah  | 12. | 10. | 09. | 51 | 00 | 13. | 001 | → KODE LOKASI |
| Kabupaten Majalengka | 02. | 06. | 02. | 01. | 30. | 020 | | → KODE BARANG |

Keterangan :

I. KODE LOKASI (Atas) :

- Kolom 1 : 12 > Kode Barang Milik Kabupaten
- Kolom 2 : 10 > Kode Lokasi Provinsi Jabar
- Kolom 3 : 09 > Kode Lokasi Kab. Majalengka
- Kolom 4 : 51 > Kode Lokasi Bidang Kecamatan XX
- Kolom 5 : 00 > Kode Lokasi Kantor Camat XX
- Kolom 6 : **13** > Tahun Pembelian Barang
- Kolom 7 : 001 > Kode Lokasi Ruang Camat

II. KODE BARANG (Bawah) :

- Kolom 1 : 02 > **Kode Golongan** Peralatan dan Mesin
- Kolom 2 : 06 > **Kode Bidang** Alat Kantor dan Rumah Tangga
- Kolom 3 : 02 > **Kode Kelompok** Alat Rumah Tangga
- Kolom 4 : 01 > **Kode Sub Kelompok** Meubeulair
- Kolom 5 : 30 > **Kode Sub Sub Kelompok** Kursi Rapat
- Kolom 6 & 7 : **020** > Register Barang (Kursi Rapat yang ke 20)

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

SUTRISNO

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**



AHMAD SODIKIN

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003